

STRATEGI KOMUNIKASI SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL DAN ANAK (SAPDA) YOGYAKARTA DALAM MENGADVOKASI HAK ANAK DISABILITAS DI YOGYAKARTA

Pelangi Aurora Oksiyana, Sunarto
aurorarara876@gmail.com

Program Studi Ilmu Komunikasi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Based on the results of the 2018-2021 National Socio-Economic Survey (Susenas), children with disabilities have lower access to information media than children without disabilities. In 2021, the difference in internet access between children without disabilities and children with disabilities increased to 7.95%. 69.06% of children without disabilities can use the internet, while only 40.56% of children with disabilities can. The purpose of this research is to analyze the communication strategy of SAPDA Yogyakarta to advocate for the rights of children with disabilities in terms of credibility, transferability, confirmability, dependability, authenticity and the factors that support and hinder the success of this strategy. This research uses Actor Network Theory with descriptive qualitative research methods. The results showed that SAPDA Yogyakarta has a role in advocating for the rights of children with disabilities through various accessible work programs. SAPDA Yogyakarta collaborates with external parties, namely the Office, Private, CSR, Organizations, Special Schools, Parents, Volunteers to support advocacy work programs by utilizing Information and Communication Technology (ICT) through mobile phones and laptops supported by applications and managing them into accessible media. Supporting factors for SAPDA Yogyakarta in implementing advocacy programs, namely having a fairly extensive external network, experiencing program sustainability and imitation. Meanwhile, the inhibiting factors of program sustainability, namely SAPDA Yogyakarta still depends on funding and has not become an independent Non-Governmental Organization (NGO) and Human Resources (HR) are also not sufficient.

Keywords: *SAPDA Yogyakarta, Children with Disabilities, Advocacy for the Rights of Children with Disabilities*

ABSTRAK

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018-2021, anak disabilitas memiliki akses media informasi lebih rendah daripada anak tanpa disabilitas. Pada tahun 2021, selisih akses internet antara anak tanpa disabilitas dan anak disabilitas meningkat menjadi 7,95%. Sebesar 69,06% anak tanpa disabilitas dapat menggunakan internet, sedangkan anak disabilitas hanya 40,56%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta untuk mengadvokasi hak anak disabilitas dilihat dari aspek *credibility, transferability, confirmability, dependability, authenticity* serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan *Actor Network Theory* dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAPDA Yogyakarta memiliki peran dalam mengadvokasi hak anak disabilitas melalui berbagai program kerja yang aksesibel. SAPDA Yogyakarta berkolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu Dinas, Swasta, CSR, Organisasi, Sekolah Luar Biasa, Orang Tua, Relawan

untuk mendukung program kerja advokasi dengan memanfaatkan *Information and Communication Technology (ICT)* melalui handphone dan laptop didukung dengan aplikasi dan mengelola menjadi media aksesibel. Faktor pendukung SAPDA Yogyakarta dalam melaksanakan program advokasi, yaitu memiliki jejaring eksternal yang cukup luas, mengalami keberlanjutan dan peniruan program. Sedangkan, faktor penghambat dari keberlanjutan program, yaitu SAPDA Yogyakarta masih bergantung pada *funding* dan belum menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mandiri serta Sumber Daya Manusia (SDM) juga belum cukup memadai.

Kata kunci: SAPDA Yogyakarta, Anak Disabilitas, Advokasi Hak Anak Disabilitas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila. Dalam penerapan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang termuat pada batang tubuh Pancasila, diperlukan berbagai upaya dan inovasi untuk membangun tatanan sosial baru yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan keadilan sosial tersebut tentunya juga perlu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak disabilitas. Anak disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun lingkungan sekitarnya. Proses tumbuh kembang anak disabilitas berbeda dengan anak sebayanya atau biasa disebut mengalami kelainan emosi, perilaku, dan intelektual. Akibatnya, anak disabilitas harus mendapatkan pelayanan dan pendidikan khusus (Siregar, 2021). Selain itu, latar belakang budaya yang beragam dari anak disabilitas memengaruhi proses adaptasi di lingkungan sekitar. Menurut pakar kepemimpinan sekaligus pembicara dunia, John C. Maxwell, disabilitas adalah

individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, sehingga dapat mengganggu atau membatasi aktivitas mereka sehari-hari. Sementara itu, menurut *World Health Organization (WHO)*, disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan pada struktur psikologis, fisiologis, atau anatomi tubuhnya.

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas di Indonesia. Lembaga ini memiliki visi untuk mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam pemenuhan serta perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam masyarakat yang inklusif dan menghormati kesetaraan hak asasi manusia.

SAPDA Yogyakarta berkolaborasi dengan organisasi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam mengatasi kasus

diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta memberikan bantuan hukum dan sosial kepada yang membutuhkan. Hal tersebut seiring dengan berbagai upaya dari SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas. SAPDA Yogyakarta merupakan lembaga berbadan hukum yang sejak awal diberi nama Lembaga SAPDA melalui Akta Notaris Anhar Rusli No. 51 Tahun 2005, kemudian diubah menjadi Akta Notaris Herry Sabto Widodo No. 7 pada tahun 2013. Pada tahun 2016, lembaga ini berubah status menjadi yayasan bernama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, sesuai dengan Akta Notaris Ika Farikha No. 4 yang tertanggal 12 Oktober 2016.

Situs web milik SAPDA Yogyakarta <https://sapdajogja.org>, berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan untuk mendukung advokasi bagi perempuan, disabilitas, dan anak. Berdasarkan penelitian Augusta Clarissa Silvy Pascalin (2024) terkait analisis aksesibilitas dan desain ulang situs tersebut bagi pengguna *low vision*, meskipun telah ada upaya perbaikan, masih terdapat banyak kesalahan yang mempengaruhi kenyamanan pengguna. Salah satunya adalah perbesaran teks yang menyebabkan konten tumpang tindih dan terpotong, sehingga sebagian informasi tidak terbaca bagi pengguna *low vision*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya advokasi

hak anak disabilitas masih jauh dari optimal.

Dewasa ini, upaya advokasi hak anak disabilitas melalui penyediaan fasilitas dalam komunikasi dan informasi publik yang inklusif menjadi isu esensial di lingkup komunikasi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, bahwa masyarakat khususnya disabilitas bergantung pada layanan informasi publik untuk mendapatkan informasi yang relevan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta masih terus berjuang dalam mewujudkan layanan komunikasi dan informasi publik inklusif, agar layak menjadi kota inklusif ramah disabilitas. Selain itu, Kota Yogyakarta juga dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam menghadapi jumlah penyandang disabilitas yang masih terbilang tinggi dibandingkan dengan kota inklusi lain di Indonesia. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memiliki sebaran anak dengan disabilitas sebesar 2.012 dari total populasi anak sejumlah 272.221. Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah berkomitmen menjadi kota inklusif, memiliki populasi anak penyandang disabilitas sebanyak 974 dari total 59.902 anak. Kota Surakarta sebagai pelopor kota inklusi, terdapat 1.971 anak penyandang disabilitas dari total populasi 35.406 anak. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki jumlah anak penyandang disabilitas yang

lebih besar. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih serius untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan seluruh jenis dan berbagai subjenis disabilitas yang ada. Jika digali lebih lanjut pada tahun sebelumnya di tahun 2020, sebaran disabilitas khususnya anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup mengkhawatirkan. Menurut data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020, dengan rincian penyandang disabilitas umur 5-9 berdasarkan 9 kategori, yaitu:

- Kesulitan berpikir/belajar sejumlah 1.381 anak
- Kesulitan mengurus diri sendiri sejumlah 2.439 anak
- Gangguan perilaku dan emosional sejumlah 1.099 anak
- Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi sejumlah 1.444 anak
- Kesulitan menggunakan jari dan tangan sejumlah 803 anak
- Kesulitan memahami atau dipahami sejumlah 1.529 anak
- Kesulitan berjalan atau naik tangga sejumlah 602 anak
- Kesulitan melihat sejumlah 435 anak
- Kesulitan mendengar sejumlah 703 anak

Sehingga, diperoleh jumlah seluruh kategori disabilitas sebesar 10.435 anak.

Gambar 1. 1 Sebaran Anak Disabilitas D.I. Yogyakarta Berdasarkan Kategori Umur

Kelompok Umur	Tingkat Kesulitan Berpikir atau Belajar				Jumlah
	Selalu Mengalami Kesulitan	Seringkali Mengalami Kesulitan	Sedikit Mengalami Kesulitan	Tidak Mengalami Kesulitan	
5 - 9	425	192	794	247.527	248.938
10 - 14	516	402	774	254.038	255.729
15 - 19	787	633	803	287.081	289.285
20 - 24	596	428	634	281.833	283.409
25 - 29	813	555	703	272.523	274.963
30 - 34	578	625	1.041	269.773	272.018
35 - 39	591	540	1.012	268.074	268.217
40 - 44	629	639	1.272	266.794	269.334
45 - 49	649	621	1.068	261.862	262.920
50 - 54	687	542	1.392	249.578	252.099
55 - 59	426	695	1.294	228.568	230.982
60 - 64	190	297	1.340	196.923	198.670
65 - 69	196	470	1.544	159.133	159.253
70 - 74	276	452	1.888	114.635	117.261
75+	1.015	2.256	7.254	140.321	150.846
Jumlah Total	8.122	8.329	22.183	3.172.824	3.174.334

Sumber: Data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020

Gambar 1. 2 Sebaran Anak Disabilitas Berdasarkan Wilayah D.I. Yogyakarta dan sekitarnya

Kabupaten/Kota	Tingkat Kesulitan Berpikir atau Belajar				Jumlah
	Selalu Mengalami Kesulitan	Seringkali Mengalami Kesulitan	Sedikit Mengalami Kesulitan	Tidak Mengalami Kesulitan	
Kabupaten/Regency					
Kulon Progo	1.319	1.156	3.175	415.536	421.186
Bantul	1.921	2.317	5.331	932.780	942.330
Gumohgiri	1.201	1.844	4.983	715.917	723.925
Sleman	2.716	3.011	6.814	1.027.164	1.069.706
Kota Municipality					
Yogyakarta	854	976	2.500	351.427	355.847
D.I. Yogyakarta	8.122	8.329	22.183	3.172.824	3.174.334

Sumber: Data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020

Dalam kesempatan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY), dikhususkan untuk kelompok disabilitas mengungkapkan terdapat berbagai keluhan dan tantangan, terutama terkait aksesibilitas di fasilitas publik yang masih kurang memadai. Micko, selaku perwakilan dari SAPDA, menekankan bahwa media aksesibel dapat berperan penting untuk individu dengan keterbatasan sensorik dan kognitif. Media aksesibilitas

dapat berupa video dengan *subtitle*, poster, atau infografis yang disertai ilustrasi menarik dan mudah dipahami, serta dokumen dengan teks yang mudah dibaca.

Hal lain dalam Workshop bertema Transformasi Digital yang Inklusif untuk mewujudkan Penyandang Disabilitas yang Berdaya Saing di Era Digital, yang berlangsung di Hall UNU Yogyakarta pada Sabtu (11/5/2024). Direktur Difapedia, Mukhanif Yasin Yusup, mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih belum mendapat kesempatan untuk mengakses layanan digital secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sektor digital untuk mendukung penyandang disabilitas. Selain itu, berdasarkan hasil survei oleh SAPDA pada tahun 2022 lalu, mengenai kebutuhan dan keinginan anak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas masih memprihatinkan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Banyak keluarga yang merasa anak disabilitas masih terabaikan dan bingung dengan kegiatan atau bantuan yang seharusnya diberikan.

Dalam dialog publik yang diadakan pada Selasa (26/9/2023), antara katalis pengembangan program bisnis dengan pemerintah Indonesia dan Australia, memaparkan bahwa sebagian

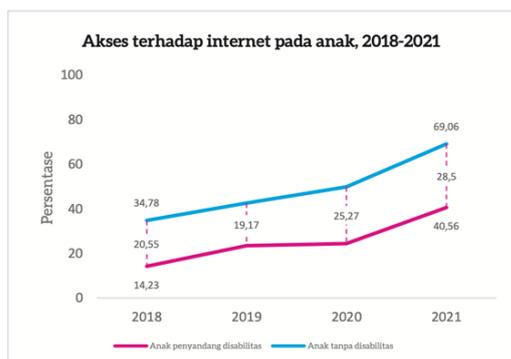
besar penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses teknologi yang nantinya dapat membantu di dunia pekerjaan. Penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya menghadapi berbagai persoalan, yaitu tingkat pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang kurang optimal, akses layanan publik yang terbatas, dan peluang ekonomi yang lebih sedikit. Berdasarkan indeks inklusivitas tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-115, tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Thailand.

Proses transformasi digital yang pesat tentunya membuka peluang baru bagi anak disabilitas dalam berkomunikasi, mengakses informasi, serta memanfaatkan produk layanan digital untuk mencapai kemandirian (*autonomy*). Transformasi digital berpotensi menciptakan paradigma baru yang mendukung inklusivitas dan mendorong partisipasi penuh bagi disabilitas (Raja, 2016). Upaya ini juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses mandiri bagi disabilitas dalam mendapatkan layanan pemerintah.

Pada kenyataannya, kesempatan anak disabilitas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi masih belum memadai. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa akses media

informasi bagi anak disabilitas masih lebih rendah dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Terlihat pada ketimpangan dalam mengakses internet yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, terlihat selisih antara akses internet untuk anak tanpa disabilitas dan disabilitas naik menjadi 7,95% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sebesar 69,06% anak tanpa disabilitas memiliki akses internet. Sedangkan 40,56% anak disabilitas yang dapat memiliki akses internet. Menurut Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Syaifa Tania, SIP., M.A., untuk menghadapi tantangan ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber, pemerintah perlu mengupayakan adanya penciptaan ruang digital yang inklusif dan humanis.

Gambar 1. 3 Data Akses Internet pada Anak (2018-2021)



Sumber: Data Susenas 2018–2021

Selain itu, fasilitas dan media pendukung bagi anak disabilitas untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi masih belum merata. Hak anak disabilitas

dalam memanfaatkan fasilitas atau media komunikasi, seperti bahasa isyarat, huruf braille, dan komunikasi augmentatif, belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam kegiatan formal. Berbagai acara resmi di Indonesia, yaitu diskusi, forum ibadah, seminar, dan fasilitas komunikasi yang aksesibel masih jarang tersedia (Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, 2017).

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertanggung jawab penuh dalam merumuskan prosedur operasi standar dalam mewujudkan layanan komunikasi publik yang inklusif, andal, dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas. "Kebijakan inklusif diharapkan mampu memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi," ujar Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kemenkominfo bertugas memastikan layanan komunikasi dan informasi publik dapat diakses secara layak oleh semua kalangan, termasuk disabilitas. Hasyim juga menyampaikan bahwa tugas Kemenkominfo meliputi penyusunan

kebijakan operasional yang mudah diakses, pengadaan fasilitas aksesibilitas pada situs web pemerintah, serta penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait bagaimana layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital relevan bagi disabilitas.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang berusaha mewujudkan aplikasi ramah disabilitas. Aplikasi ini berbasis *website* yang terhubung dengan *platform* info.go.id. Aplikasi ini tentunya dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti fitur memperbesar atau memperkecil teks, pengaturan suara, dan penyesuaian tata letak teks rata kiri-kanan. Hasyim menjelaskan bahwa aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, diharapkan dari keberadaan aplikasi ini dapat menjadi acuan sekaligus dorongan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain untuk menciptakan dan mengembangkan aplikasi serupa.

Dalam pelaksanaannya, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hak tersebut meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, kesehatan, agama, olahraga,

budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, serta perlindungan, rehabilitasi, dan habilitasi dari bencana. Hak tersebut juga meliputi kemandirian, kebebasan berekspresi, berkomunikasi, akses terhadap informasi, dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi. Ditegaskan pada pasal 5 ayat 3 bahwa anak penyandang disabilitas berhak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual; hak atas pengasuhan keluarga atau pengasuh pengganti untuk tumbuh kembang yang ideal; pelibatan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingannya; perlakuan manusiawi sesuai dengan harkat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk integrasi sosial dan pengembangan individu; dan memperoleh bantuan sosial. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 tentang pembentukan kelompok kerja anak penyandang disabilitas yang bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada pemerintah daerah

dan masyarakat terkait perlindungan anak penyandang disabilitas. Kelompok kerja ini bertugas melakukan sosialisasi, penanganan permasalahan dan kasus yang timbul, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ditegaskan pada Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa pembangunan yang inklusif disabilitas adalah pembangunan yang melibatkan peran serta penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat dalam seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas dipertegas oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Sub Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Setda Kota Yogyakarta. Rahmat menjelaskan bahwa secara umum Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta

untuk mewujudkan kota inklusif serta memastikan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengesahkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ditegaskan pada Pasal 53 dan Pasal 54 mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan aksesibilitas bagi setiap anak penyandang disabilitas di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, agama, kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas harus disertai dengan perlakuan manusiawi untuk memenuhi kebutuhan khusus dan integrasi sosial yang setara.

Berdasarkan data temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang optimal. Situasi ini menegaskan bahwa adanya kebijakan dan program saja tidak cukup dalam menghadapi kendala disabilitas, perlu disertai upaya *monitoring* dan evaluasi. Sehingga, peneliti ingin memahami strategi komunikasi yang digunakan oleh SAPDA untuk memperjuangkan hak anak disabilitas. Penelitian ini diharapkan mendukung kesetaraan sosial dari berbagai lingkup sosial. Sehingga, hasilnya diharapkan menjadi masukan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan serta memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas dalam masyarakat inklusif yang berlandaskan persamaan hak asasi manusia.

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis dan menjelaskan strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, menganalisis dan menjelaskan aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, dan memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta.

KERANGKA TEORETIS

Paradigma *Postpositivism*

Paradigma *post-positivism* menekankan pada penjelasan kualitatif, dengan pandangan bahwa realitas bersifat subjektif dan kompleks, serta pengetahuan tidaklah bebas dari nilai. Pendukung *post-positivism* berusaha mengurangi kelemahan *positivism* dan melakukan penyesuaian. Dalam paradigma ini, prediksi dan kontrol menjadi tujuan utamanya (Putra & Hidayat, 2017). Oleh karena itu, banyak kelemahan *positivism* yang diperbaiki oleh paradigma dan mengandalkan pada realitas empiris.

Untuk menuju “body of knowledge” perlu adanya kontribusi data dan informasi yang berasal dari paradigma *post positivism* bersifat kualitatif (induktif) yang diperlukan untuk perspektif tambahan yang saling melengkapi (Setioko, 2011).

Perspektif penelitian yang relevan adalah sibernetika di mana peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem organisasi saling mempengaruhi satu sama lain, mempertahankan kendali, dan mencapai keseimbangan untuk menciptakan suatu perubahan. Tradisi sibernetika menyoroti bagaimana memahami strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek subjektif melalui pengalaman langsung anak disabilitas bagaimana proses interaksi sosial maupun struktur budaya dalam lingkup kehidupannya.

Actor Network Theory

Teori ini dicetuskan oleh Weick dan Taylor. Teori jaringan aktor disebut sebagai “sosiologi penerjemahan” atau “teori penerjemahan” yang berfokus pada melihat cara-cara kolektif maupun institusi dibangun melalui praktek dan aktivitas manusia yang didukung oleh keberadaan, seperti teknologi, mesin, dan protokol. Teori jaringan aktor diadopsi oleh beberapa bidang yang menjelaskan bagaimana interaksi menciptakan proses dan struktur dalam skala besar.

Menurut pandangan Weick, organisasi terbentuk melalui aktivitas yang terus berlangsung, terutama melalui interaksi antar aktor. Dalam interaksi ini, aktor tidak hanya berkomunikasi atas nama diri mereka sendiri, tetapi juga mewakili kelompok atau jaringan yang lebih luas, yang mendasari konsep teori jaringan aktor. Aktor bertindak untuk kelompok, organisasi, atau lembaga dengan mentransformasi makna dari interaksi dasar atau mikro ke dalam konteks yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pemahaman dan penggunaan informasi oleh aktor di luar jaringan tersebut. Dengan demikian, penerjemahan menjadi proses komunikasi yang sangat penting dalam setiap aktivitas pengorganisasian.

Karakteristik teori jaringan aktor, terdiri dari: a) Aktor (*Actant*), aktor tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga benda-benda, seperti teknologi, kebijakan, perangkat, dan bahkan ide. Setiap elemen ini dianggap sebagai "aktor" atau "actant" yang dapat mempengaruhi jaringan; b) Jaringan (*Network*), aspek ini berfokus pada bagaimana aktor berinteraksi dalam jaringan yang saling berkaitan. Hubungan atau interaksi ini tidak hanya melibatkan komunikasi, tetapi juga bagaimana berbagai aktor saling memengaruhi, membentuk, atau mengubah peran mereka dalam jaringan tersebut; c) Proses Translasi (*Translation*), translasi adalah proses di

mana aktor-aktor dalam jaringan berusaha untuk memengaruhi atau mengkoordinasikan tujuan. Proses ini melibatkan langkah-langkah negosiasi, pembuatan aliansi, dan penyesuaian yang memungkinkan aktor untuk membentuk jaringan yang kohesif; d) Materialitas, mencakup elemen non-manusia, seperti teknologi atau infrastruktur, memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan organisasi. Materialitas (kehadiran benda fisik) dianggap dapat memengaruhi tindakan manusia, dan bukan hanya sekadar "alat" yang netral.

Actor Network Theory dianggap relevan untuk mendukung penelitian tentang SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teori jaringan aktor menyoroti ranah konstitusi dalam upaya mewujudkan komunikasi yang komunikatif di organisasi (CCO). Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi dokumen, catatan, email, papan tulis, presentasi slide, dan "teknologi" pada proses pengorganisasian. Teknologi memiliki sifat pengorganisasian dalam menghubungkan orang, lembaga, dan program. Teori jaringan aktor secara khusus digunakan ketika jaringan yang diteliti dibentuk melalui sarana teknologi, misalnya pengiklan *online* disatukan dalam sebuah asosiasi formal, tetapi juga melalui berbagi teknologi pelacakan perilaku *online* (Beck, 2015). Salah satu konsep dari teori

jaringan aktor yang dimanfaatkan oleh komunikasi organisasi adalah konsep agensi non-manusia. Hal tersebut terjadi berdasarkan pengakuan atas peran teknologi dalam organisasi dan juga pengakuan yang lebih luas bahwa agensi tidak terbatas pada manusia, tetapi juga dimiliki oleh dokumen dan angka. Dalam hal teknologi, Taylor dan Van Every (1993) menggunakan Callon dan Diskusi Latour untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan materialitas memberikan daya tahan dan visibilitas pada “aktor makro” organisasi. Aktor makro tidak berada pada “level” yang berbeda dari makhluk lain; ia tidak “lebih besar” atau lebih luas daripada apa yang disebut individu. Sebaliknya, ini adalah horizontal dari individu-individu dengan juru bicara yang memberi mereka kemampuan untuk bertindak dan berbicara secara kolektif. Selain teknologi, para ahli komunikasi organisasi juga telah mengakui kontribusi dari bentuk-bentuk agensi non-manusia lainnya. Secara khusus, ada yang disebut “agensi tekstual,” yaitu, kemampuan teks dari semua jenis dokumen, kontrak, prosedur, selebaran untuk membuat perbedaan dalam berbagai situasi. Teori jaringan aktor adalah pusat dari sejumlah perspektif dalam komunikasi organisasi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah konstitutif dari organisasi. Teori ini menekankan pada cara materialitas, termasuk teknologi, dokumen,

dll. dengan peralihan dari satu episode komunikasi ke organisasi yang lebih besar dan stabil. Kontribusi dari aspek material dalam organisasi dalam konteks komunikasi dapat menyatukan ruang dan waktu. Menurut Barbara Czarniawska (2004), organisasi dipahami sebagai tindakan yang dijalin bersama melalui narasi.

Dalam penelitian ini, *Actor Network Theory* memberikan kerangka kerja untuk mengamati bagaimana strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta yang tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga membangun jaringan aktor yang mendukung upaya advokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teori ini juga membantu memahami bagaimana interaksi aktor-aktor di level komunikasi organisasi. *Actor Network Theory* memandang organisasi komunikasi SAPDA sebagai jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, baik manusia (anggota SAPDA, komunitas disabilitas, pemerintah) maupun non-manusia (kebijakan, teknologi, media). *Actor Network Theory* memungkinkan peneliti melihat bagaimana komunikasi di dalam organisasi maupun antar aktor eksternal terjadi dalam lingkup jaringan yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang

menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau kelompok menangani suatu isu tertentu. Studi kasus deskriptif dapat berupa cerita tentang situasi dunia nyata yang dihadapi orang atau kelompok dan bagaimana mereka mengatasinya. Menurut penelitian ini, penggunaan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) dianggap relevan. Studi kasus intrinsik adalah model penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meneliti tentang suatu kasus. Studi kasus ini tidak dilakukan untuk menempatkan kasus tersebut mewakili kasus lain, tetapi lebih menekankan pada kekhususan dan keunikannya. Jadi, pemilihan desain penelitian ini didorong oleh ketertarikan atau kepedulian peneliti pada suatu kasus tertentu. Penelitian dilakukan pada kasus secara keseluruhan, tanpa harus menghasilkan konsep atau teori tertentu atau berusaha menggeneralisasikan temuan penelitian (Poerwandari, 2007: 125). Kata "intrinsik" lebih menunjukkan bahwa penelitian studi kasus jenis ini ditujukan untuk menggali secara mendalam faktor yang melatarbelakangi sebuah kasus. Sehingga, peneliti berharap dapat memahami situasi dan fenomena tertentu. Kasus ini menarik karena unik dan sederhana. Tujuan dari studi kasus intrinsik ini bukan untuk mengembangkan teori, melainkan karena adanya ketertarikan intrinsik untuk mengeksplorasi kehidupan nyata anak disabilitas melalui strategi

komunikasi yang diterapkan oleh SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi kasus, kemudian mendeskripsikan dan menganalisisnya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai latar belakang, sifat, dan karakteristik kasus tersebut. Menurut Yin (1984a; 1981b), penelitian studi kasus merupakan bagian dari penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena di dunia nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas, dan menerapkan bukti dari berbagai sumber yang ada.

Teknik pengumpulan data primer yang dipakai oleh peneliti, terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: a) Multisumber bukti, peneliti berkonsentrasi pada masalah historis, sikap, dan observasi yang lebih luas. Multi sumber bukti dapat mengembangkan kesatuan inkuiri, proses triangulasi berdasarkan pada sumber informasi yang berlainan, dan diikuti oleh pendukungnya. Masing-masing strategi ini dimodifikasi untuk membuat satu strategi yang didukung dari berbagai bukti relevan. Pengumpulan data studi kasus sangat bermanfaat yang memungkinkan peneliti menggunakan berbagai sumber bukti yang berbeda daripada metode penelitian lainnya, seperti eksperimen, survei, atau historis; b) Data dasar studi kasus, peneliti mengorganisasikan dan mencatat data yang

dikumpulkan. Dokumen tersebut terdiri dari dua kategori berbeda, yaitu data bukti dasar dan laporan peneliti berbentuk artikel, laporan, buku. Data dasar kemudian digunakan sebagai bahan analisis sekunder atau laporan independen oleh peneliti awal untuk memperkuat reliabilitas studi kasus secara keseluruhan. Data dasar, mencakup empat komponen, yaitu catatan, dokumen, bahan tabulasi, dan narasi; c) Memelihara rangkaian bukti, peneliti mengumpulkan data dengan mempertimbangkan fakta dan masalah metodologis untuk menetapkan validitas konstruk, sehingga meningkatkan kuantitas bukti yang dikumpulkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini. Pertama, laporan harus memuat sifat yang efektif tentang bagian data dasar studi kasus yang relevan. Kedua, data dasar harus menyatakan bukti aktual dan valid untuk menunjukkan keadaan di mana bukti tersebut dikumpulkan. Ketiga, keadaan ini harus konsisten dengan prosedur pertanyaan yang ditetapkan di dalam protokol studi kasus. Dalam studi kasus, pengumpulan data sekunder dapat digunakan sebagai tambahan atau pendukung dalam studi kasus, menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Yin, 2022).

Sumber data primer diperoleh melalui bukti langsung, data dasar, dan rangkaian bukti yang saling berkaitan. Sumber bukti merujuk pada informasi yang berasal dari dua bahkan lebih dari sumber

tertentu berdasarkan fakta atau temuan yang serupa. Data dasar merupakan segenap bukti formal yang dikumpulkan dari sumber bukti yang relevan. Rangkaian dari bukti ini harus menunjukkan hubungan yang jelas antara pertanyaan yang diajukan, data data yang dikumpulkan, dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang relevan. Daftar pertanyaan wawancara tentunya perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran dan konsistensi pengumpulan informasi. Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan dari bahan-bahan seperti buku, jurnal, artikel dari media cetak atau *online* yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis studi kasus dalam (Yin, 2022) terdapat tiga teknik analisis, yaitu: a) Perjodohan Pola, suatu pola yang ditemukan oleh peneliti dalam studi kasus, dibandingkan lalu dicocokkan dengan asumsi dasar yang dibuat sebelum pengumpulan data. Jika terdapat kecocokan atau persamaan, maka hasilnya dapat membantu memperkuat validitas internal. Prosedur strategi pola tersebut, yaitu Variabel NonEquivalen sebagai pola, pola variabel dependen dalam desain non-equivalen merujuk pada "desain variabel non-equivalen yang dependen" (Cook dan Campbell, 1979, hlm. 118). Dalam desain

ini, eksperimen atau kuasi-eksperimen memungkinkan adanya banyak variabel dependen yang berarti ada berbagai hasil yang mungkin terjadi. Informasi kausal yang kuat dapat diperoleh berdasarkan hasil nilai yang diprediksi sebelumnya, asalkan pola alternatif dan nilai yang diprediksi (termasuk nilai yang berkaitan dengan ancaman validitas) belum teridentifikasi. b) Pembuatan Eksplanasi, peneliti akan menganalisis data studi kasus sebelumnya dengan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kasus tersebut. Prosedur strategi eksplanasi, yaitu mencakup unsur eksplanasi, yang menjelaskan hubungan timbal-balik yang dibuat dalam bentuk naratif yang menggambarkan beberapa proposisi teoretis yang signifikan. Suatu bentuk pernyataan atau proposisi teoretis awal yang berisi tentang kebijakan atau perilaku sosial; Perbandingan temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi; Perbaiki pernyataan atau proposisi; Untuk melakukan revisi, pertimbangkan rincian kasus lainnya; Perbaiki lagi pertanyaan atau proposisi; Pertimbangkan revisi berdasarkan fakta dari kasus yang kedua, ketiga, atau lebih; dan Ulangi prosedur sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan; c) Analisis Deret Waktu, peneliti menggunakan data penelitian untuk analisis deret waktu. Peneliti menyajikan informasi tentang waktu penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan akan runtut

untuk memenuhi kebutuhan dari analisis awal hingga akhir. Prosedur strategi deret waktu, yaitu Deret waktu sederhana, mencakup satu variabel dependen atau independen. Dalam hal ini, jika data yang relevan tersedia dalam jumlah banyak, uji statistik dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana variabel tertentu berubah atau berperilaku sepanjang waktu, meskipun fokusnya lebih terbatas pada satu aspek saja dari data yang ada; Deret waktu kompleks mencakup pola ganda atau lebih dalam analisis lintasan waktu. Strategi ini digunakan untuk mengevaluasi deret waktu yang melibatkan beberapa variabel atau lebih banyak data yang kompleks. Dalam hal ini, analisis akan menghasilkan eksplanasi yang sesuai dengan pola hasil yang lebih rumit dan membandingkan hasil-hasil relevan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Deret waktu kompleks memungkinkan untuk melihat kecenderungan dan pola yang lebih rinci, serta menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan bukti yang lebih kuat untuk teori-teori yang diajukan; Kronologis, metode yang sering digunakan dalam studi kasus, khususnya dalam analisis deret waktu. Teknik ini melacak peristiwa seiring berjalannya waktu dalam urutan kronologis untuk menilai hubungan kausal antara peristiwa tersebut. Kronologi

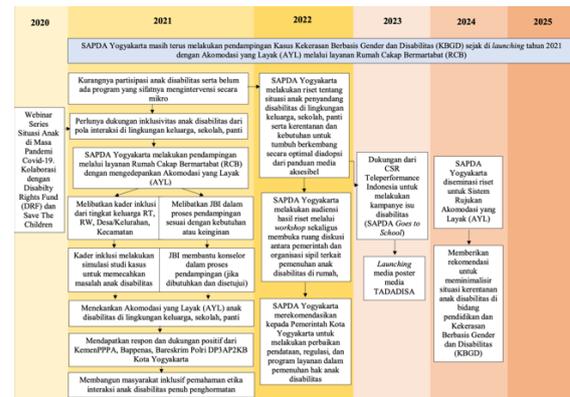
memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menganalisis urutan sebab-akibat yang tidak dapat dibalik, yang sangat berguna dalam memahami hubungan antar peristiwa sepanjang waktu. Fokus analisis peristiwa kronologis adalah pada membandingkan urutan kejadian yang diharapkan menurut beberapa teori eksplanatoris dari situasi atau fenomena yang diteliti. Teori ini mengacu pada satu atau lebih jenis situasi, yaitu Peristiwa tertentu harus terjadi sebelum peristiwa yang lain, sehingga urutan yang terbalik tidak akan mungkin terjadi; Peristiwa tertentu harus diikuti oleh peristiwa lain, karena kontingensi; Peristiwa tertentu hanya dapat mengikuti peristiwa lain dalam waktu yang telah diprediksi; Beberapa kelompok dapat sangat berbeda dari kejadian lain selama periode waktu tertentu dalam studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) Yogyakarta Dalam Mengadvokasi Hak Anak Disabilitas Di Yogyakarta

Berdasarkan temuan penelitian, upaya mengadvokasi hak anak disabilitas dimulai sejak tahun 2020 hingga berjalan sampai dengan tahun 2025. Berikut merupakan bagan alir yang menjelaskan tahapan advokasi hak anak disabilitas apabila dilihat dari kronologis waktu dan

akan dijelaskan secara terperinci melalui penjelasan sub bab.



Gambar 4. 1 Kronologis Proses Advokasi Hak Anak Disabilitas

Dalam suatu organisasi, proses komunikasi yang dilakukan para aktivis sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Hardjana, 2016:17). Secara teoritis, penelitian ini relevan dengan penggunaan *actor network theory* yang dirumuskan peneliti. Teori ini berfokus pada cara kolektif dari organisasi yang dibangun melalui praktek dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana struktur dan jaringan aktor berperan dalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh SAPDA Yogyakarta.

a) Pembentukan Jaringan Aktor Melalui Translasi

Pembentukan jaringan aktor terjadi melalui proses negosiasi, pembuatan aliansi, penyesuaian aktor, dan pembentukan kohesivitas. Teori jaringan aktor menempatkan agensi manusia (aktor) dan agensi non-manusia (artefak) secara

simetris (Ekomadyo, et al., 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada bagian negosiasi sejumlah aktor menyampaikan bahwa permasalahan hak anak di Kota Yogyakarta saat ini cukup kompleks dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Upaya advokasi kebijakan untuk persamaan hak disabilitas merupakan suatu tonggak awal SAPDA Yogyakarta dalam membela kesetaraan aksesibilitas untuk anak disabilitas. Hal tersebut dilakukan melalui advokasi kebijakan yang kemudian berkembang ke berbagai bidang. Terkait dengan aksesibilitas, karena hal itu menjadi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas tentunya perlu didorong serta dipenuhi haknya berdasarkan persamaan hak asasi manusia. Sehingga, aksesibilitas menjadi kunci penting bahwa perlu diadvokasikan dan didorong terkait dengan persamaan hak disabilitas.

Pada bagian kedua, pembuatan aliansi aktor di dalam jaringan organisasi, saling memengaruhi, membentuk, atau mengubah suatu peran sosial. Aktor menjalin hubungan dengan kelompok rentan, seperti lansia, orang tua dengan anak disabilitas, dan kader tingkat keluarga, RT, RW, sampai dengan Desa. Mulai dari tingkat keluarga, SAPDA Yogyakarta melakukan riset terkait dengan siklus perkembangan kehidupan anak disabilitas mulai dari Ibu dengan anak disabilitas

hamil, dilahirkan, berkembang ke masa anak-anak, berkembang ke masa remaja, akhirnya berkembang ke masa dewasa sampai lansia. Dari riset tersebut diperoleh hasil bahwa pola *parenting* menjadi salah satu hal yang fundamental. Selain itu, penerimaan orang tua dengan anak disabilitas juga dapat menjadi pergulatan emosi yang mana penerimaan ini berbanding lurus dengan perkembangan anak disabilitas. Sehingga, perlu adanya *treatment* dan deteksi lebih dini dengan keberadaan anak disabilitas. Selanjutnya, upaya lain menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu peningkatan *awareness* dari pola komunikasi antara orang tua dengan anak disabilitas melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh hola Gender Equality, Disability & Social Inclusion (GEDSI) SAPDA Yogyakarta di bawah pendanaan dari Disability Rights Fund (DRF). Puluhan kader inklusi yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tersebar di empat kemantren di Kota Yogyakarta, yaitu Jetis, Kotagede, Wirobrajan, dan Kraton. Dari pelatihan ini, diharapkan para kader dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, nantinya mampu menyosialisasikan isu perlindungan anak disabilitas di Kota Yogyakarta dengan menggandeng langsung keluarga yang memiliki anggota anak penyandang disabilitas. Selain itu, interaksi dengan anak disabilitas juga terus dilakukan melalui *assasement*. SAPDA

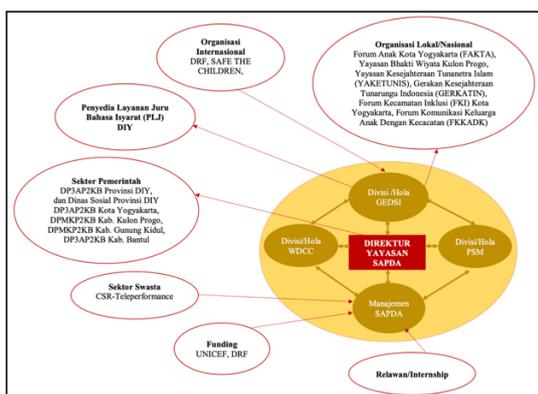
Yogyakarta mengumpulkan data riset melalui pihak guru dengan memahami bagaimana karakteristik anak tersebut. Setelah data riset terkumpul, pihak SAPDA Yogyakarta melakukan diskusi untuk memformulasikan ide yang diperoleh. Akhirnya, dapat diambil keputusan untuk metode *grouping*. Metode ini diharapkan dapat menggali informasi bagaimana teman-teman disabilitas ini berkomunikasi dengan orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Metode *grouping* dijalankan menyesuaikan dengan hambatan anak disabilitas yang telah dikelompokkan sebelumnya didukung dengan infrastruktur yang relevan. Hal tersebut dimaksimalkan melalui bagaimana berkomunikasi dengan bermain boneka, berkomunikasi dengan menggambar, berkomunikasi dengan menyusun *puzzle*, berkomunikasi dengan lempar bola, dan lain sebagainya. Proses komunikasi yang aksesibel ini yang menjadi poin utama dan perlu diperhatikan dari anak disabilitas. Selain itu, untuk memperkuat hal tersebut, SAPDA Yogyakarta juga meliterasi khalayak umum tentang hak disabilitas dengan cara *mainstreaming* disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan anak disabilitas agar berkolaborasi bersama dengan anak tanpa disabilitas. Sehingga, anak disabilitas dapat memiliki kesempatan yang setara untuk bersosialisasi, belajar, dan berkembang. Dari strategi ini,

diharapkan dapat menekan angka diskriminasi terhadap anak disabilitas serta mendukung anak disabilitas berpartisipasi aktif di berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya. SAPDA Yogyakarta juga melakukan riset partisipan dari advokasi hak anak disabilitas, lalu memfasilitasi aspirasi mereka, serta mengajak masyarakat sekitar untuk berkontribusi aktif dengan terus memonitoring perilaku anak disabilitas.

Pada bagian ketiga, penyesuaian aktor dengan cara memahami serta mengkoordinasikan karakteristik, kebutuhan, dan kendala dari anak disabilitas. Aktor berupaya untuk mengenali hambatan dari anak disabilitas. Hal ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan anak disabilitas serta menanyakan beberapa hal yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Metode yang digunakan adalah FGD/*Grouping* riset suara anak disabilitas yang berkolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Yogyakarta. Beberapa ragam disabilitas dari kategori anak dikumpulkan dalam satu tempat yang sama, dilengkapi dengan *guideline interview* yang ditujukan kepada anak disabilitas dari SAPDA Yogyakarta. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi anak disabilitas ketika di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hal apa saja yang mereka inginkan untuk diri pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dari hasil

riset ini dapat diusulkan dan diaudiensikan kepada Bappeda dan dinas-dinas terkait

Pada bagian keempat, pembentukan kohesivitas dengan cara aktor membentuk kebersamaan yang inklusif melalui *crosscheck* dan penyelarasan pendanaan dengan *output* yang dilakukan. SAPDA Yogyakarta memperhatikan adanya *Charged Protection Policy* (CPP) yang merupakan bentuk perlindungan atau jaminan terhadap risiko yang kemungkinan timbul dari strategi yang dijalankan.



Gambar 4. 2 Jaringan Aktor untuk Mengadvokasi Hak Anak Disabilitas

b) Peran Aktor dalam Strategi Komunikasi

Selain konsep translasi, dalam *actor network theory* keberadaan aktor internal maupun eksternal merupakan sebuah kunci dari terbangunnya interaksi yang ada di dalam jaringan. Aspek interaksi tersebut akan mempengaruhi proses-struktur dari organisasi. Peran aktor dalam strategi komunikasi, yaitu mempengaruhi *stakeholder*, membentuk program

aksesibel, serta mengadvokasi hak anak disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi yang digunakan oleh SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas adalah menggunakan strategi komunikasi pemberdayaan. Jika dilihat dari konteks pemberdayaan, materialitas yang mendukung komunikasi pemberdayaan, meliputi aspek teknologi, infrastruktur, dan interaksi sosial. Tindakan komunikatif mengacu pada tindakan sesuai dengan arahan norma-norma yang disepakati bersama. Tindakan ini diharapkan memiliki timbal balik di antara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol tertentu, khususnya bahasa sehari-hari. (Habermas, 1984). Komunikasi yang komunikatif menjadi aspek penting untuk menciptakan proses yang inklusif. Hal ini memungkinkan anak disabilitas merasa didengarkan, dihargai, dan memiliki peran aktif dalam suatu perubahan sosial. Di dalam proses komunikasi komunikatif, tentunya tidak lepas dari peran aktor yang mana setiap aktor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa komunikasi berjalan efektif, saling memahami, dan dapat mencapai tujuan bersama. Aktor tersebut terdiri dari aktor internal dan aktor eksternal yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas diri untuk mengendalikan hidup mereka sendiri,

membuat keputusan, dan mempengaruhi kondisi mereka dalam membentuk realitas sosial.

SAPDA Yogyakarta berkolaborasi dengan aktor eksternal, seperti organisasi, CSR, Dinas, orang tua, SLB, JBI, dan relawan. SAPDA Yogyakarta berjejaring dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan relawan dari luar SAPDA Yogyakarta untuk mendukung layanan konseling dan penanganan kekerasan. Saat melakukan pendampingan, tentunya aspek komunikasi sangat lekat dengan Akomodasi yang Layak (AYL) untuk anak disabilitas yang diperlukan pemahaman lebih lanjut. Sehingga, dari keberadaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) ini, SAPDA Yogyakarta dapat mengidentifikasi secara mendalam apa yang menjadi ragam disabilitas, apa hambatannya, dan apa kebutuhan khususnya. Bersama organisasi Disability Rights Fund (DRF) dan Save The Children SAPDA Yogyakarta bekerja sama dalam mengedukasi anak disabilitas saat berhadapan dengan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan pada kesempatan Webinar Series pada 2020 lalu dengan target sasaran anak disabilitas dalam skala nasional. Selain itu, SAPDA Yogyakarta berkolaborasi dengan *funding* melalui upaya riset kebutuhan dan keinginan anak disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani menyampaikan hasil riset kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam

kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas kepada perwakilan Wali Kota Yogyakarta; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta; Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selain itu, sejumlah organisasi sipil di Kota Yogyakarta juga turut terlibat, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni); Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatun); Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK), Forum Anak; Forum Kemantren Inklusi, perwakilan Sekolah Luar Biasa (SLB) serta perwakilan orang tua dengan anak disabilitas. Penyampaian hasil riset bertujuan untuk membuka ruang diskusi antara pemerintah dengan organisasi sipil terkait upaya pemenuhan hak-hak anak disabilitas di rumah, sekolah dan panti. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menyusun rencana kerja pemenuhan hak anak disabilitas secara multi pihak yang diperoleh beberapa poin identifikasi, antara lain pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas; informasi

pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi; layanan kesehatan yang terjangkau secara biaya, jarak dan informasi; penerimaan dan pengasuhan yang positif dari keluarga dan masyarakat; data anak disabilitas yang terbaru dan terhubung dengan sistem administrasi kependudukan; metode dan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi disabilitas di keluarga, masyarakat dan pemberi layanan; serta perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sehingga, Pemerintah Kota Yogyakarta direkomendasikan untuk dapat menindaklanjuti temuan dengan langkah konkret sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak anak disabilitas dapat dipenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

SAPDA Yogyakarta juga mendapatkan dukungan untuk kerja advokasi dari CSR Teleperformance Indonesia yang memiliki dua kantor cabang di Yogyakarta, yaitu Jogja City Mall dan Sleman City Hall. Teleperformance memiliki program CSR bernama *Citizen of The World* yang merupakan inisiatif perusahaan secara global yang berupaya untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut difokuskan untuk menekan angka kemandirian diri anak disabilitas di Yogyakarta dengan cara membuat media edukasi agar mereka dapat

memahami situasi darurat kerentanan di lingkungan sekitar. Media edukasi yang digunakan berupa poster komik versi *hardfile* berjumlah 1.000 (seribu) pcs dengan informasi berisi tanggap bencana dan hal apa saja yang anak disabilitas perlu lakukan saat berada di keramaian maupun sendirian. Selain itu, SAPDA Yogyakarta melakukan kampanye untuk isu-isu disabilitas melalui sosialisasi program TADADISA dengan nama kegiatan SAPDA *Goes to School*. Program ini dilakukan dengan mengedukasi terkait Tanggap Darurat Untuk Anak Disabilitas Fisik, Mental, dan Intelektual dalam bentuk media edukasi keselamatan diri dalam situasi darurat di kehidupan sehari-hari (TADADISA) serta melakukan pembagian poster terkait lomba mewarnai anak disabilitas setingkat SD untuk 6 (enam) Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, yaitu SLB N 1 Yogyakarta, Yayasan Panti Sayap Ibu 3, SLB N Pembina Yogyakarta, SLB Karnnamanohara, SLB N 2 Yogyakarta, SLB Muhammadiyah Dekso.

Tidak hanya itu, dukungan lain juga berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KP) Gunung Kidul dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penjangkaran suara anak disabilitas. Hal ini merupakan bentuk eksekusi dalam upaya

audiensi suara anak disabilitas dan mengalami keberlanjutan pada program Musrenbang. Program Musrenbang ini dilakukan secara konsisten oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KP) Kota Yogyakarta selama 3 kali dalam setahun. Pada tahun 2023 Musrenbang ini berfokus pada isu pendidikan, sedangkan 2024 lalu berfokus pada isu kekerasan.

2. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Komunikasi Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) Yogyakarta Dalam Mengadvokasi Hak Anak Disabilitas Di Yogyakarta

Penelitian mengenai strategi komunikasi Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta memberikan pemahaman bahwa penerapan strategi yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam proses pelaksanaannya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengakses informasi, yaitu *easy of navigation* (kemudahan akses), *convenience* (kenyamanan individu), *modern equipment* (peralatan yang modern), dan *self reliance* (kepercayaan diri) (Fatmawati, 2013:222-223). Relevan

dengan strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta yang mengutamakan kepentingan sosial, kesetaraan, dan keadilan sosial dari anak disabilitas. Strategi dan infrastruktur dikemas sedemikian rupa secara aksesibel untuk anak disabilitas berdasarkan kondisi/kebutuhannya yang berpedoman pada *Charged Protection Policy* (CPP), apabila ingin melakukan riset dari anak disabilitas. *Charged Protection Policy* (CPP) merupakan bentuk perlindungan atau jaminan terhadap risiko yang kemungkinan timbul dari program SAPDA Yogyakarta. Kesan positif yang dirasakan anak disabilitas terhadap program yang dilakukan SAPDA Yogyakarta adalah bagaimana SAPDA Yogyakarta meliterasi khalayak umum tentang advokasi hak perempuan dan perempuan dengan anak disabilitas, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu penting yang berhubungan dengan perempuan dan anak disabilitas, serta bagaimana cara mengatasi tantangan yang anak disabilitas hadapi. Selain itu, SAPDA Yogyakarta juga mempertimbangkan adanya kolaborasi dari pihak eksternal yang beragam mulai dari organisasi, CSR, Dinas, orang tua, SLB, dan relawan.

Dalam menjalankan program dan strategi, tentunya SAPDA Yogyakarta memiliki hambatan dan tantangan

tersendiri. SAPDA Yogyakarta termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum mandiri dan *sustain*, masih tergantung pada *funding*. Selain itu, juga persaingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain yang dapat berpengaruh pada *track record* SAPDA Yogyakarta. Dalam keberjalanannya, SAPDA Yogyakarta sempat memiliki fasilitas di bidang komunikasi yang aksesibel untuk anak disabilitas, yaitu perpustakaan. Hal tersebut tidak berlangsung lama. Sumber Daya Manusia yang belum memadai mengakibatkan fasilitas SAPDA Yogyakarta *vaccum* (sampai dengan waktu yang belum ditentukan). SAPDA Yogyakarta merupakan lembaga yang belum *sustainability* dengan pendanaan yang belum mandiri. SAPDA Yogyakarta tidak memiliki server aksesibel milik sendiri, SAPDA cenderung memanfaatkan teknologi yang telah ada. Teknologi dan aplikasi yang telah ada, dimanfaatkan dan dimaksimalkan melalui fitur tertentu dengan memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan tepat dan efektif. SAPDA Yogyakarta memanfaatkan *Information and Communication Technology* (ICT) berupa aplikasi yang telah ada dengan mengelola menjadi media yang aksesibel untuk anak disabilitas, baik dari Website (<https://sapdajogja.org>), YouTube (Sapda Media), Instagram

(@sapdajogja), Facebook (SAPDA Jogja), Twitter (@SAPDAJogja), dan Yahoo (info_sapda@yahoo.com) disertai dengan JBI dan *subtitle* yang relevan.

3. Dampak dari Terbentuknya Jaringan Aktor

Hasil dari penelitian mengenai strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta akan menjadi salah satu langkah dari perubahan. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dalam proses pengidentifikasian masalah atau potensi dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan mengevaluasi perubahan yang terjadi (Rukminto, 2008). Terlihat dari berbagai kolaborasi untuk mendukung program pemberdayaan secara efektif. Hubungan dalam komunikasi pemberdayaan menjadi dasar untuk menciptakan kepercayaan, kolaborasi, dan keberhasilan dalam proses pemberdayaan dengan aktor internal maupun aktor eksternal organisasi.

SAPDA Yogyakarta dalam menjalankan strateginya masif melakukan koordinasi, monitoring, maupun evaluasi melalui Rencana Strategis (Renstra) sekaligus menjadi pedoman dan bahan masukan untuk langkah strategis selanjutnya. Musrenbang merupakan bagian dari keberlanjutan program FGD

suara anak disabilitas yang dilakukan SAPDA Yogyakarta. Melalui program FGD tersebut, mendapatkan respon positif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. Sehingga, program dari suara anak disabilitas ini dijadikan program tahunan oleh dinas tersebut yang mana sudah berjalan hampir hampir dua tahun di lingkup Kota Yogyakarta. SAPDA Yogyakarta juga turut mendampingi program Musrenbang Anak dimulai dari bulan Februari tahun lalu. Dukungan dan keberlanjutan program SAPDA Yogyakarta ini dapat meningkatkan peluang advokasi melalui jejering mitra yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

Dengan terbentuknya jaringan aktor yang bisa terdiri organisasi, CSR, Dinas, orang tua, SLB, dan relawan, kapasitas advokasi SAPDA Yogyakarta menjadi lebih kuat. Setiap aktor membawa sumber daya, pengaruh, dan keahlian yang berbeda-beda, sehingga upaya advokasi hak anak disabilitas bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sehingga, isu hak anak disabilitas ini lebih mudah masuk ke agenda kebijakan publik. Kolaborasi dari jaringan kader di wilayah setempat ini akan membantu memperkuat *framing* positif terhadap isu anak disabilitas.

SIMPULAN

Strategi komunikasi dari SAPDA Yogyakarta secara keseluruhan menggambarkan adanya praktek advokasi yang transformatif dengan menempatkan anak disabilitas sebagai aktor aktif dalam proses pemberdayaan. Praktek advokasi ini menggunakan pendekatan kolaboratif antar aktor, penyusunan program berbasis data, serta keberpihakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Program advokasi yang menjangkau anak disabilitas berfokus pada pendekatan inklusif mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan masyarakat ramah disabilitas, memberikan kesempatan yang setara, dan menekan angka diskriminasi terhadap anak disabilitas. Sehingga, melalui a) Program Life Spend Development, SAPDA Yogyakarta dapat menekankan pentingnya pola asuh yang tepat serta penerimaan orang tua terhadap anak disabilitas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak disabilitas dari masa ke masa. Deteksi dini dan perawatan yang tepat akan sangat mendukung bagi kemajuan mereka; b) Program FGD Suara Anak Disabilitas, melalui riset dan kolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), SAPDA Yogyakarta berhasil mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan aspirasi anak disabilitas yang kemudian diadvokasikan kepada pihak terkait, termasuk Bappeda

dan dinas-dinas yang relevan; c) Kolaborasi Hasil Karya Buku, program ini menghasilkan buku “Panduan Produksi Media Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” dan “Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas dan Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum di Indonesia untuk Penyandang Disabilitas)” yang mana dapat menjawab kebutuhan anak disabilitas dalam beberapa lingkup kehidupan; d) Program Musrenbang, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam kebijakan daerah melalui respons dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk ((DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, yang menjadikan program ini sebagai agenda tahunan; e) Pelayanan Konseling Hukum dan Psikologi, menyediakan layanan konseling tanpa biaya untuk perempuan dan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara individual dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka; f) Layanan Rumah Cakap Bermartabat (RCB), SAPDA Yogyakarta terus berupaya mewujudkan klinik konseling mandiri yang ditujukan untuk anak disabilitas dan orang tua mereka serta menciptakan ruang yang lebih inklusif dari dukungan psikologis; g) Mainstreaming Disabilitas, program ini bertujuan untuk mengintegrasikan anak disabilitas dalam

kehidupan sosial yang lebih luas, mengurangi diskriminasi, dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan; h) Advokasi Kebijakan untuk Persamaan Hak Disabilitas, berfokus pada pengembangan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta memperjuangkan kesetaraan hak mereka dalam berbagai bidang kehidupan; i) Program Workshop, bertujuan untuk menggali aspirasi anak disabilitas mengenai apa yang mereka inginkan dan butuhkan, serta memberikan pelatihan bagi fasilitator yang dapat mendampingi mereka dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri; j) Penggunaan Media yang Ramah Disabilitas, SAPDA Yogyakarta mendorong penggunaan media *mainstream* yang lebih inklusif dan aksesibel untuk anak disabilitas, agar mereka dapat mengakses informasi dan berinteraksi lebih baik dengan lingkungan sekitar; k) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak disabilitas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan memahami hak atas tubuh mereka melalui berbagai media dan kegiatan edukasi; l) Assasement dan Mengenal Hambatan Anak Disabilitas, melibatkan pengumpulan data riset melalui sekolah, memfasilitasi komunikasi dengan berbagai metode yang sesuai dengan hambatan dan

kebutuhan anak disabilitas. Metode ini mendukung pengembangan komunikasi yang aksesibel dan efektif bagi mereka.

Dalam melaksanakan program, SAPDA Yogyakarta juga memperhatikan aspek *Credibility*, yang mana hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan SAPDA Yogyakarta dalam menjalankan program kerjanya, yaitu melalui tahap penelitian/riset. Hal tersebut menjangkau Informan yang relevan mengetahui kondisi/kebutuhan dari anak disabilitas. Sehingga, dari penelitian/riset tersebut dapat menyesuaikan program aksesibel untuk anak disabilitas. Sehingga, kesetaraan hak asasi manusia dapat tercapai. Selanjutnya, aspek *Transferability* berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian ini dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Hal tersebut dilakukan SAPDA Yogyakarta melalui program kerja Musrenbang yang mana program tersebut merupakan hasil adopsi dari program sebelumnya, yaitu FGD Suara Anak Disabilitas. Program Musrenbang ini ditiru dan mengalami keberlanjutan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta yang dijadikan program tahunan yang sudah berjalan hampir hampir dua tahun di lingkup Kota Yogyakarta. Lalu, aspek *Confirmability* berkaitan dengan konsep

transparansi penelitian untuk secara terbuka memperlihatkan hasil penelitian kepada pihak eksternal. Hal tersebut dilakukan oleh SAPDA Yogyakarta melalui publikasi hasil karya lagu dari anak disabilitas melalui akun media YouTube (SAPDA Media). Lagu ini berisi puisi hasil karya anak disabilitas yang dikemas dengan metafora kata berisi curhatan hati anak disabilitas berjudul *Cerita Kami* (<https://www.youtube.com/watch?v=OVmsWPQWGas>). Aspek yang selanjutnya, *Dependability* berkaitan dengan kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian ini konsisten dengan didukung literatur eksternal. Hal tersebut relevan dilakukan, yang mana SAPDA Yogyakarta sering melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Salah satunya dengan Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan buku pedoman sebagai literatur untuk pendamping anak disabilitas. Buku tersebut berisi tentang Kesehatan Reproduksi relevan dengan anak disabilitas yang memasuki masa remaja serta bagaimana pola asuh dari oleh orang tua menekan angka kekerasan seksual. Terakhir, aspek *Authenticity* yang mana berkaitan dengan keaslian data yang diterima oleh penerima informasi harus benar-benar terjaga. SAPDA Yogyakarta juga teliti dalam melakukan penelitian dengan tetap berpedoman pada *Charged Protection Policy (CPP)*, yang memerlukan

berbagai tahap apabila ingin melakukan riset dari anak disabilitas. Sehingga, untuk aspek keaslian data tentu sangat diperhatikan.

Faktor pendukung dari strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta, yaitu jejaring eksternal yang cukup luas, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan organisasi melalui sumber daya dan dukungan dari pihak eksternal. Selain itu, program SAPDA Yogyakarta juga telah mengalami keberlanjutan dan peniruan program dari pihak dinas setempat yang dapat mendukung percepatan informasi yang aksesibel untuk seluruh ragam disabilitas di berbagai daerah. Selanjutnya, yang menjadi penghambat sekaligus tantangan dari keberlanjutan program SAPDA Yogyakarta, yaitu SAPDA Yogyakarta masih bergantung pada *funding* dan belum menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mandiri. Dilihat dari rekam jejak SAPDA Yogyakarta, unsur Sumber Daya Manusia (SDM) terlihat belum mencukupi kebutuhan dari organisasi tersebut. Hal tersebut berpengaruh pada salah satu fasilitas milik SAPDA Yogyakarta di bidang Komunikasi, yaitu perpustakaan aksesibel bagi disabilitas. Perpustakaan ini *vacuum* sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, berbagai persaingan dari Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) lain yang lebih mandiri dalam melaksanakan programnya juga menjadi tantangan bagi SAPDA Yogyakarta.

SARAN

1. Saran Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih memperdalam penggunaan teori dan konsep, khususnya teori yang relevan dalam pemberdayaan anak disabilitas agar mendapatkan hasil penelitian yang baru dan lebih kaya informasi. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan pra survei dengan lebih cermat dan teliti baik melalui literatur yang berfokus pada teori yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup konsep dasar, model, dan kerangka teoritis yang relevan dengan fenomena yang ingin diteliti.

2. Saran Sosial

Dalam penelitian ini, SAPDA Yogyakarta disarankan dapat mencanangkan program yang berkelanjutan melalui kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak anak disabilitas. Selain itu, dapat mengadakan forum **komunitas dukungan orang tua** secara daring dan luring yang ditujukan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengasuhan. Dari program ini, diharapkan SAPDA dapat menguatkan jejaring untuk mendapatkan dukungan untuk

menyebarkan informasi tentang hak anak disabilitas. Sehingga, terbentuklah proses komunikasi yang lebih objektif.

3. Saran Praktis

Dalam penelitian ini, SAPDA dapat membuat serta optimalisasi *platform* digital melalui aplikasi satu fungsi. *Platform* ini menyediakan akses informasi yang dikemas melalui berbagai format, seperti audio, visual, maupun audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas. Selain itu, mengadakan program pelatihan seputar anak disabilitas mulai dari materi terkait hak anak disabilitas,

hambatan anak disabilitas, teknik dasar advokasi, komunikasi efektif dan aksesibel bagi anak disabilitas, studi kasus dan praktik simulasi, penggunaan media advokasi, serta perencanaan advokasi. Pelatihan ini dapat menjangkau orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meningkatkan metode wawancara, observasi, dokumentasi dengan berkomunikasi secara langsung dengan Informan maupun objek penelitian. Sehingga, kondisi nyata dari data yang mendukung penelitian dapat tergambar secara jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2015). Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Andriani, D. A., Nurdin, N., & Dakhalan, A. M. (2023). Aksesibilitas Bagi Pemustaka Disabilitas di UPT Perpustakaan Universitas Tadulako. *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information*, 2(1), 36-46.

Anindyo, Krishna. (2020). Bantu Ketimpangan Akses Informasi Penyandang Tuli, Laura Ajak Masyarakat Belajar Bahasa Isyarat. Dalam [https://www.industry.co.id/read/71963/bantu-ketimpangan-akses-](https://www.industry.co.id/read/71963/bantu-ketimpangan-akses-informasi-penyandang-tuli-laura-ajak-masyarakat-belajar-bahasa-isyarat)

[informasi-penyandang-tuli-laura-ajak-masyarakat-belajar-bahasa-isyarat](https://www.industry.co.id/read/71963/bantu-ketimpangan-akses-informasi-penyandang-tuli-laura-ajak-masyarakat-belajar-bahasa-isyarat). Diunduh pada tanggal 12 November 2024 pukul 12.01 WIB.

Athallah, I. R., & Subroto, M. (2021). Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 28–35. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11>.

Beck, E. N. (2015). The Invisible Digital Identity: Assemblages In Digital Networks. *Computers and Composition*, 35, 125–140.

- doi:10.1016/j.compcom.2015.01.005
- Biro Humas. (2020). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. Dalam <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>. Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 09.10 WIB.
- Ekomadyo, A. S., Prasetyo, F. A., & Yuliar, S. O. N. N. Y. (2013). Place Construction and Urban Social Transformation: An Actor Network Theory Analysis for Creative-Kampung Phenomena in Bandung. *HABITechno: Innovation Housing and Settlement Technology*, 230-239.
- Daroini, S., & Jumriyah, J. (2020). Penguatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui Forum Malang Inklusi (FOMI): Studi Kasus Persatuan Tunanetra (Pertuni) Kabupaten Malang.
- Effendy, Onong Uchajana. (2002). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Espine, Sheila. (2008). *Developing Advocacy for Children and Young People*. United Kingdom: Jessica Kingsley Publisher.
- Evelina, L. W. (2020). Peran Media Sosial Kamibijak. id dalam Menciptakan Akses Daring Ramah Disabilitas untuk Teman Tuli. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 20-36.
- Fatmawati, E. (2013). Matabaru Penelitian Perpustakaan: Dari SERVQUAL ke LibQUAL, Jakarta: Sagung Seto.
- Febriani, D. R., & Supratiwi, S. (2025). Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1310-1324.
- Grehenson, Gusti. (2024). Indonesia Masih Hadapi Ketimpangan Akses Internet dan Rentannya Keamanan Siber. Dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/indonesia-masih-hadapi-ketimpangan-akses-internet-dan-rentannya-keamanan-siber/>. Diunduh pada 28 Oktober 2024 pukul 10.09 WIB.
- Habermas, Jurgen. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Jilid 1. Boston: Beacon Press.
- Hanafi, A., Asnawi, C., & Yogyakarta, Y. (2020). Evaluasi Situs Web Menggunakan Website Accessibility Conformance

- Evaluation Methodology (WCAG-EM) 2.0 pada Situs-Situs E-Commerce di Indonesia. *Politeknosains*, 19(2), 30-34.
- Hanum, L. N. (2023). Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hardjana, Andre. (2016). Komunikasi: Organisasi Strategi dan Kompetensi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Humas Rehsos Anak. (2020). ICT Sangat Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penyandang Disabilitas. Dalam <https://kemensos.go.id/ict-sangat-berperan-dalam-peningkatan-kualitas-hidup-anak-penyandang-disabilitas>. Diunduh pada tanggal 18 November 2024 pukul 09.23 WIB.
- Hwa, C. K. (2011). Analisis meta pengaplikasian teknik menyemak data semasa pelaksanaan penyelidikan tindakan. *Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun*, 5(1), 45.
- Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *IJDS*, 16-25. *Keperawatan*. P3AIUPI.
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin. (2022). Dalam <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-banjarmasin--2022.html?year=2022>. Diunduh pada 21 Oktober 2024 pukul 17.15 WIB.
- Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta. (2023). Dalam <https://dataset.jogjakota.go.id/en/dataset/kyda2023-21>. Diunduh pada 15 Oktober 2024 pukul 17.19 WIB.
- Jumlah Penyandang Disabilitas. (2022) Dalam <https://dispendukcapil.surakarta.go.id/download/dkb-2022-smt-i-jumlah-penyandang-disabilitas/>. Diunduh pada 13 Oktober 2024 pukul 21.19 WIB.

- Kemenko PMK. (2023). Pentingnya Penggunaan Media Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-penggunaan-media-aksesibel-bagi-penyandang-disabilitas>. Diunduh pada 9 Oktober 2024 pukul 17.19 WIB.
- Kolyubi, A., Amiruddin, S., & Riswanda, R. (2024). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 106-115. <https://doi.org/10.47828/jianaasia.n.v12i1.198>.
- MD, Mukhotib., Tommy., Khomeini, R, A., Muhdlor, S., Baskoro, M, N., Surani, S., Andriani, S, N., Muharawan, I. (2021). Panduan Media Aksesibel Program 'Action' (Active Citizens Building Solidarity And Resilience In Response To Covid-19). Yogyakarta: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak (SAPDA).
- Noviyanti, S. (2023). Mayoritas Penyandang Disabilitas di Indonesia Kekurangan Akses pada Teknologi Penunjang, Apa Dampaknya? Dalam <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/26/163735886/mayoritas-penyandang-disabilitas-di-indonesia-kekurangan-akses-pada>. Diunduh pada 5 Oktober 2024 pukul 10.09 WIB.
- Novrizaldi. (2023). Pentingnya Penggunaan Media Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-penggunaan-media-aksesibel-bagi-penyandang-disabilitas>. Diunduh pada 7 Oktober 2024 pukul 16.10 WIB.
- Pankajam, A. (2018). *Digitalisation for Sustainable Development*, Asian Journal of Multidimensional Research, vol. 7, no. 1, pp 201-207.
- Pascalin, S, C, A. (2024). Analisis Aksesibilitas dan Perancangan Ulang Desain Situs Web SAPDA JOGJA Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Skripsi*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Poerwandari, E. K. (2007). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan

- Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 44-55.
- Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta. (2022). Dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-d-i-yogyakarta-x-1000-2017-2025.html>. Diunduh pada 18 Oktober 2024 pukul 10.10 WIB.
- Putra, D. W., & Hidayat, H. P. (2017). Filsafat Ilmu Terkait Dengan Perencanaan Wilayah Dan Kota (Studi kasus: Green Urban Open Space dan Quality of Life). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2), 112-120.
- Raja, D. S. (2016). Bridging The Disability Divide Through Digital Technologies. *Background Paper for The World Development report*.
- Sanders, R. (2020). *Digital Inclusion, Exclusion and Participation*, Available: <https://www.iriss.org.uk/resources/esss-outlines/digital-inclusion-exclusion-and-participation>
- SAPDA. (2016). Profile Yayasan SAPDA. Dalam <https://sapdajogja.org/2016/01/profil-sapda/>. Diunduh pada 11 Februari 2025 Pukul 09:41 WIB.
- Setioko, B. (2011). Penggunaan Metoda Grounded Theory Dibawah Payung Paradigma Post Positivistik Pada Penelitian Tentang Fenomena Sosial Perkotaan. *Modul*, 11(1).
- Siregar, A. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.